

Pemberdayaan Masyarakat Pada Akses Sanitasi Berkelanjutan

Community Empowerment in Access to Sustainable Sanitation

Najah Alvi Mas'adah¹

¹Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga

Corresponding: najah.alvi.mas'adah-2016@fisip.unair.ac.id

Abstract

This study aims to describe community empowerment for access to sustainable sanitation, a case study in Doudo Village, Panceng District, Gresik Regency, East Java. The method used in this research is descriptive qualitative research method. The selection of informants was done by purposive sampling. Data obtained through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used qualitative analysis. The results of the research on the implementation of empowerment were carried out in three stages, namely: (a) the awareness stage by conducting socialization to the community which was considered optimal supported by high community participation to participate in the socialization, (b) the capacity stage involving program participants into activities including training activities, pre-construction activities, and health counseling activities that are considered good are supported by the delivery of detailed and clear material, and (c) the empowerment stage with the ability of program participants to help Doudo Village realize sanitation goals.

Keywords: *community empowerment, sustainable sanitation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat untuk akses sanitasi berkelanjutan studi kasus di Desa Doudo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling. Data didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian pelaksanaan pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahap yaitu: (a) tahap penyadaran dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dinilai optimal didukung dengan partisipasi masyarakat yang tinggi untuk mengikuti sosialisasi, (b) tahap pengkapasitasan melibatkan peserta program kedalam kegiatan meliputi kegiatan pelatihan, kegiatan pra konstruksi, dan kegiatan penyuluhan kesehatan yang dinilai baik didukung dengan penyampaian materi secara rinci dan jelas, dan (c) tahap pendayaan dengan adanya kemampuan peserta program membantu Desa Doudo mewujudkan tujuan sanitasi.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, sanitasi berkelanjutan.

Pendahuluan

Program sanitasi berbasis masyarakat diharapkan mampu mendukung percepatan pencapaian target dan Universal Access atau 100 persen akses air minum dan sanitasi yang layak berdasarkan *milestone Sustainable Development Goals (SDGs)*. Penyelenggaraan pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) yang mana merupakan tanggung jawab atau wewenang daerah, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki peraturan atau kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan investasi. Usaha tersebut diperlukan agar pelaksanaan SPAM dapat memenuhi target standar pelayanan minimal (SPM) serta dapat mencapai Universal Access. Untuk membantu mempercepat pencapaian target SDGs, sejak tahun 2008 Pemerintah telah melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Pemerintah Pusat memiliki tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Bappenas, 2018, Indonesia telah mencapai 84 persen akses air minum dan 77 persen akses sanitasi layak. Namun pemerintah terus berupaya untuk menyediakan akses air minum layak bagi 32 juta jiwa penduduk dan sanitasi layak bagi 67 juta penduduk. Indonesia berhasil meningkatkan akses air minum layak dari 61.15% di tahun 2015 menjadi 84.19% di tahun 2019. Selain akses air minum layak yang meningkat, Indonesia juga berhasil meningkatkan akses sanitasi layak dari 62.14% di tahun 2015 menjadi 77.39% di tahun 2019 (Riset Kesehatan Dasar Bappenas, 2018)

Tabel 1

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan Menurut Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan Menurut Provinsi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	48.28	51.21	55.14	54.86	79.26
Sumatera Utara	63.37	60.17	61.10	62.40	84.66
Sumatera Barat	54.4	54.78	57.52	59.31	73.07
Riau	68.64	69.6	71.71	77.34	83.77
Jambi	52.65	54.38	54.25	57.53	68.40
Sumatera Selatan	55.35	53.47	52.81	58.3	72.75
Bengkulu	31.02	26.91	30.36	36.89	44.99
Lampung	45	40.79	45.35	45.85	65.76
Kep. Bangka Belitung	61.34	57.32	61.42	59.13	66.72
Kep. Riau	73.3	74.9	76.92	75.12	80.42
Dki Jakarta	92.38	89.76	85.88	88.39	99.80
Jawa Barat	55.31	55.97	59.61	62.37	88.34
Jawa Tengah	66.71	69.81	69.59	73.03	90.86
Di Yogyakarta	75.47	73.73	69.8	73.63	91.02
Jawa Timur	68.99	67.89	67.16	66.52	91.89
Banten	50.98	49.95	50.83	59.07	82.29
Bali	86.8	81.26	84.8	84.28	95.27
Nusa Tenggara Barat	63.76	68.91	61.66	69.13	92.02
Nusa Tenggara Timur	52.96	50.96	58.81	64.79	75.01
Kalimantan Barat	60.97	59.39	62.94	66.71	70.30
Kalimantan Tengah	46.06	51.09	51.90	57.40	63.42
Kalimantan Selatan	53.1	50.04	48.56	50.46	60.57
Kalimantan Timur	66.44	66.7	71.71	73.31	73.24
Kalimantan Utara	78.41	73.71	75.53	82.62	82.35
Sulawesi Utara	61.34	57.91	63.19	66.71	86.38
Sulawesi Tengah	53.05	54.44	57.2	61.64	76.63
Sulawesi Selatan	62.7	65.54	66.68	70.82	85.84
Sulawesi Tenggara	75.03	72.14	76.36	76.31	89.10
Gorontalo	56.6	60.92	66.6	69.91	90.92
Sulawesi Barat	40.02	46.09	47.51	51.35	61.92
Maluku	55.79	51.97	58.91	67.71	86.86
Maluku Utara	46.08	53.8	54.98	54.93	78.71
Papua Barat	54.62	53.08	62.93	66.87	74.93
Papua	39.02	38.75	51.99	51.8	55.49
Indonesia	61.15	61.57	62.75	65.28	84.91

Sumber: Survei Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa total jumlah persentase rumah tangga

yang memiliki akses terhadap air minum layak di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 61.15%, tahun 2016 sebesar 61.57%, tahun 2017 sebesar 62.75%, tahun 2018 sebesar 65.28% dan pada tahun 2019 sebesar 84.91%. Jadi dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam tabel juga dapat dilihat bahwa di tahun 2019 Provinsi Jawa Timur termasuk dalam 5 (lima) besar rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tertinggi menurut provinsi yaitu sebesar 91.89%. Adanya keseriusan pemerintah yang didukung juga dengan partisipasi masyarakat dapat memberikan perubahan kondisi menjadi lebih baik. Selanjutnya terdapat data mengenai rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak di Indonesia menurut Provinsi sebagai berikut.

Tabel 2

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi yang Layak Menurut Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Menurut Provinsi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	54.68	62.68	63.38	67.09	73.16
Sumatera Utara	67.89	72.86	73.00	74.60	79.59
Sumatera Barat	45.02	53.24	52.77	56.85	63.98
Riau	51.30	71.36	70.04	71.48	80.04
Jambi	58.21	65.65	64.20	63.99	75.60
Sumatera Selatan	61.30	65.05	66.36	68.60	74.67
Bengkulu	39.22	49.75	42.71	44.31	75.91
Lampung	44.83	58.58	52.89	52.48	79.22
Kep. Bangka Belitung	80.80	83.16	83.56	85.64	90.32
Kep. Riau	71.97	79.55	86.33	85.07	89.13
Dki Jakarta	89.28	91.13	91.13	90.73	92.89
Jawa Barat	59.43	63.79	64.40	64.73	69.64
Jawa Tengah	67.20	70.66	71.84	74.04	80.29
Di Yogyakarta	86.31	85.78	89.40	88.92	94.67
Jawa Timur	63.48	68.15	68.83	68.84	78.78
Banten	67.04	73.42	71.68	70.65	81.01
Bali	85.46	89.33	90.51	91.14	94.59
Nusa Tenggara Barat	63.72	70.31	69.25	73.70	80.02
Nusa Tenggara Timur	23.90	40.46	45.31	50.72	64.55
Kalimantan Barat	39.78	52.06	49.65	53.97	72.08
Kalimantan Tengah	35.88	50.97	45.46	52.55	69.23

Kalimantan Selatan	60.13	60.89	58.09	62.76	76.56
Kalimantan Timur	68.83	76.76	72.83	79.19	89.27
Kalimantan Utara	78.41	73.71	75.53	82.62	77.20
Sulawesi Utara	66.79	75.27	71.93	75.23	82.36
Sulawesi Tengah	55.37	59.94	61.12	64.15	71.95
Sulawesi Selatan	72.36	76.51	76.73	79.61	87.80
Sulawesi Tenggara	63.62	68.26	69.52	69.90	79.75
Gorontalo	54.96	59.85	58.75	64.30	74.57
Sulawesi Barat	51.21	59.81	59.48	63.21	73.39
Maluku	60.02	66.81	63.29	69.05	70.00
Maluku Utara	59.17	64.71	66.18	66.96	72.52
Papua Barat	62.81	64.55	65.30	73.95	76.39
Papua	28.04	31.43	33.06	33.75	38.27
Indonesia	62.14	67.80	67.89	69.27	77.39

Sumber: Survei Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan data diatas, maka dapat dilihat bahwa akses terhadap sanitasi layak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 persentase akses sanitasi layak tidak mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 67.89%. Meskipun secara nasional, terjadi peningkatan akses sanitasi layak namun hanya 12 provinsi yang mengalami peningkatan sekitar 1-2% persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak. Selebihnya terdapat 22 provinsi yang justru mengalami penurunan 1-5% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak. Dalam tabel dapat dilihat bahwa akses sanitasi layak di Provinsi Jawa Timur berada di angka 78% yang artinya bahwa pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan akses sanitasi di Jawa Timur yang ditandai dengan adanya peningkatan persentase akses sanitasi layak sekitar 4-10%.

Salah satu desa di Kabupaten Gresik yang menerima bantuan Program PAMSIMAS adalah Desa Doudo. Pada tahun 2008, Desa Doudo menemukan sumber air dan berusaha untuk melakukan pengerukan telaga, pembuatan sumur gali, dan pengeboran sumur dengan kedalaman 102 meter yang dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sehingga air bersih sudah mengalir menuju rumah-rumah warga. Sampai pada tahun 2013 masih ada beberapa warga yang belum mendapatkan akses air bersih sepenuhnya dengan jumlah penduduk. 1.432 dan 398 KK. Warga yang sudah mendapatkan akses air bersih sekitar 723/201 KK sedangkan yang belum mendapatkan air bersih sekitar 709/197 KK. Oleh karena itu Pemerintah Desa Doudo melakukan pengajuan Program PAMSIMAS pada tahun 2014 dan kemudian disetujui

sehingga Desa Doudo kembali mendapatkan satu sumur bor melalui Program PAMSIMAS dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 200 juta (www.desabisa.com, diakses 26 Januari 2020).

Pemberdayaan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali dalam proses pembangunan dinilai lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat setempat merupakan lingkup yang dianggap penting dalam mengelola serta mengupayakan kehidupan yang sehat dan bersih di suatu daerah. Dengan pemberdayaan dalam proses pembangunan, pengadaan prasarana air minum dan sanitasi yang dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat juga dapat diupayakan secara optimal. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat untuk akses sanitasi berkelanjutan studi kasus di Desa Doudo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur?

Metode Penelitian

Metode untuk menjawab permasalahan penelitian pemberdayaan masyarakat untuk akses sanitasi berkelanjutan studi kasus di Desa Doudo digunakan metode penelitian kualitatif (Sugiono, 2010; Miles dan Huberman 1994). Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Doudo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling. Data didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif Miles dan Huberman (1994) terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) mulai berkembang sekitar dekade 1970-an dan semakin populer memasuki awal abad ke-21. Konsep ini dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran yang banyak dikenal dengan aliran post modernisme yang dititik beratkan pada sikap dan pendapatnya adalah anti sistem, anti struktur, dan antri determinisme kepada dunia kekuasaan (Priyono dan Pranaka, 1996; Huraerah, 2008). Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Oleh karena itu, ide utama dari pemberdayaan berkaitan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2005; Paul, 1987; Saleebey, 1992). Pemberdayaan

berkaitan dengan adanya kemampuan manusia didalam sebuah komunitas atau kelompok yang lemah. Suharto (2005) menyatakan bahwa: “Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasar sehingga manusia memiliki kebebasan dalam hal bebas dari kebodohan, kelaparan, dan kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan untuk dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang serta jasa yang diperlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka:.

Pemberdayaan dapat dipahami berbeda menurut cara pandang orang, maupun dalam konteks kelembagaan, politi, sosial budaya. Sutoro Eko (2005) mengatakan bahwa pemberdayaan menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek penerima manfaat, melainkan dianggap sebagai subjek yang mandiri. Pemberdayaan juga dilihat sebagai upaya memberi kekuasaan sebagai jawaban atas ketidakberdayaan (*powerless*) masyarakat.

Pembangunan masyarakat dengan tujuan pemberdayaan berfokus pada bantuan kepada komunitas yang dapat berupa dukungan atau support secara intensif dan ekstensif dari pemerintah seperti memberi dorongan semangat, menyediakan kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menentukan masa depan mereka sendiri, serta berperan aktif dalam setiap kegiatan di masyarakat (Jim Ife & Frank Tesoriero, 2008).

Dalam hal ini Kartasasmita (1996) menjelaskan mengenai definisi pemberdayaan yaitu memandirikan masyarakat yang mana dianggap sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Sedangkan Sedarmayanti (2000) menjelaskan bahwa kata empower memiliki 2 arti, yaitu pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua adalah *to give ability to or enable to*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai pemberian kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses tindakan sosial, yang ditujukan untuk mengatasi rendahnya kontrol yang dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi dalam masyarakat, memperkuat komunitas dan jaringan sosial, mempromosikan kepercayaan

pada masyarakat bahwa mereka dapat mengendalikan dirinya sendiri dan menjadi pemimpin dalam perubahan lingkungan sosial. Proses tindakan sosial diterapkan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu adanya kegiatan untuk mendampingi masyarakat dalam membuat analisis masalah yang dialami, serta membantu menemukan solusi dari masalah tersebut.

Pemberdayaan masyarakat ditekankan pada proses tindakan sosial. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang menjelaskan bahwa terdapat 3 tahapan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut: (a) Tahap Penyadaran, pada tahap ini dimulai dengan adanya sosialisasi yang ditujukan untuk komunitas agar mereka mengerti bahwa dalam kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, serta dilakukan secara mandiri. Sentuhan penyadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat ini, dan dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik; (b) Tahap Pengkapasitasan, pada tahap ini komunitas dilatih dan diberikan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya sebelum diberdayakan. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan yang memiliki hubungan dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. (c) Tahap Pendayaan, pada tahap ini merupakan komunitas diberikan daya, kekuasaan, serta peluang sesuai dengan kemampuan yang telah diperoleh. Kedisiplinan dan keteraturan melaksanakan tahapan dalam proses pemberdayaan dapat menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan aktivitas pemberdayaan. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, diperlukan sebuah strategi untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran dan tujuan organisasi.

Penggunaan istilah pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan paradigma pembangunan masyarakat (*community development*) yang muncul dari adanya kritik terhadap paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi, yang dikemukakan oleh Ife (1995) bahwa pemberdayaan memiliki arti yaitu mendekatkan masyarakat pada sumber-sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan masa depan mereka untuk berperan juga didalamnya, serta memberikan pengaruh pada kehidupan di komunitasnya.

Penyajian dan Analisis Data

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Akses Sanitasi Berkelanjutan Studi Kasus di Desa Doudo

Terdapat tiga jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pamsimas yang akan dibahas yaitu: Pelatihan Tingkat Masyarakat, Pembangunan Sarana Air Minum di Masyarakat dan Sanitasi di Sekolah, dan Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi. Sedangkan jenis kegiatan pada Program Pamsimas akan dihubungkan dan dianalisis menggunakan tahap pemberdayaan masyarakat. Tahap pemberdayaan masyarakat ada tiga yaitu: tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007). Jenis Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pamsimas di desa Doudo sesuai dengan Petunjuk Teknis kegiatan Program Pamsimas tahun 2013.

Pemberdayaan masyarakat diwujudkan dengan cara memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam pemberdayaan tersebut. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan membutuhkan kontribusi dari masyarakat baik dalam bentuk incash yang berupa iuran uang dan inkind yang berupa kerjasama gotong royong dalam melakukan pembangunan yang dapat dinilai dengan uang. pemberdayaan masyarakat di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik terdiri atas kegiatan pelatihan tingkat masyarakat, pembangunan sarana air minum di masyarakat dan sanitasi di sekolah, serta promosi perubahan perilaku hygiene dan sanitasi. Secara lebih detail, kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Program Pamsimas ini akan dihubungkan dan dianalisis menggunakan tahap dalam pemberdayaan masyarakat

Tahap Pemberdayaan Masyarakat Untuk Akses Sanitasi Berkelanjutan

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menjelaskan bahwa terdapat 3 tahapan dalam melaksanakan pemberdayaan yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.

Tahap Penyadaran

Tahap pertama yaitu tahap penyadaran. Sentuhan penyadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat mengenai kondisi mereka, sehingga demikian dapat menumbuhkan kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Pada tahap ini dimulai dengan adanya sosialisasi

yang ditujukan untuk komunitas agar mereka mengerti bahwa dalam kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka. Tujuan dilakukan tahap ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Program Pamsimas.

Dalam tahap ini dapat dikatakan bahwa pengetahuan menjadi penting sebelum melakukan proses pengkapasitasan dan pendayaan sehingga sangat perlu dilakukan sosialisasi terkait keberlangsungan program. Karena Sosialisasi bertujuan untuk mengkomunikasikan terkait kegiatan yang ada didalam program. Sosialisasi yang dimaksud adalah pengenalan mengenai program secara mendetail agar masyarakat yang mengikuti program memahami dan mengetahui kejelasannya. Program Pamsimas merupakan program nasional yang dilaksanakan pemerintah guna membantu menumbuhkan masyarakat mengenai penyediaan air dan mengatasi masalah sanitasi. Pada tahapan ini, pihak pelaku pemberdayaan yaitu KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) dan Satuan Pelaksana (Satlak) Desa Doudo didampingi fasilitator yang bertugas menciptakan prakondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang baik. Bentuk kegiatan pertama dalam Program Pamsimas ini adalah pelatihan di tingkat masyarakat. Pelatihan ini dilakukan oleh anggota KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) Desa Doudo dan Satuan Pelaksana (Satlak). Kegiatan ini dilakukan di tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk berkumpul seperti balai desa, dan sekolah.

Tabel 3

Jenis Kegiatan Peningkatan Perubahan Perilaku Hidup Sehat di Masyarakat dan Sekolah

Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Bahan dan media yang digunakan	Pelaksana
Masyarakat						
Promosi Penggunaan air yang bersih, sehat, dan aman dari pencemaran	Peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak buruk menggunakan air yang tercemar	Masyarakat di tiap dusun	Semua Dusun	1 Kali	ATK (Kertas plano, spidol) dan alat peraga penyuluhan	Satlak , Sanitarian
Penyuluhan PHBS	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai	Masyarakat di tiap dusun	Semua Dusun	1 Kali	ATK (Kertas plano, spidol) dan alat peraga	Satlak , Sanitarian

	PHBS				penyuluhan (poster, tempat cuci tangan, dan lain-lain)	
Penyuluhan tentang penyakit yang disebabkan oleh air	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit yang disebabkan oleh air serta upaya menjaga kebersihan air	Masyarakat di tiap dusun	Semua Dusun	1 Kali	ATK (Kertas plano, spidol) dan alat peraga penyuluhan	Satlak , Sanitarian
Pelatihan Kader Pola Hidup Sehat	Meningkatkan pengetahuan kader kesehatan tentang pola hidup sehat	Masyarakat di tiap dusun	Semua Dusun	1 Kali	Gunting, kertas warna, dan lain-lain	Satlak , Sanitarian
Sekolah						
Promkes melalui penyuluhan	Meningkatkan pengetahuan siswa tentang PHBS, cuci tangan yang benar, dan bahaya BAB sembarang tempat	Siswa	Sekolah	2 kali	Spidol, karton, flipchart, dan lain-lain	Satlak , Sanitarian, Guru
Demo gosok gigi	Meningkatkan pengetahuan siswa tentang cara gosok gigi yang benar	Siswa	Sekolah	1 Kali	Sikat gigi, pasta gigi, dan lain-lain	Satlak , Sanitarian, Guru

Sumber: Dokumen RKM Desa Doudo, 2021

Semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan frekuensi pelaksanaan kegiatan yang sudah tersedia. Mulai dari kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat sampai kegiatan yang dilakukan untuk warga sekolah. Setelah menjelaskan mengenai rincian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan promosi perubahan perilaku hygiene dan sanitasi, pihak Satlak dan KKM serta dibantu Tim Fasilitator Masyarakat juga menjelaskan mengenai rincian biaya selama pelaksanaan promosi perubahan perilaku hygiene dan sanitasi.

Tahap Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan merupakan kelanjutan dari tahap penyadaran. Setelah adanya sosialisasi dalam tahap penyadaran, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam tahap pengkapasitasan ini adalah memberikan mereka kemampuan dan

keterampilan sebagai proses belajar. Masyarakat nantinya akan menjalani berbagai proses belajar yang memiliki hubungan dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Proses belajar ini bisa diwujudkan dengan beragam kegiatan yang sudah ditentukan dalam program dan ditujukan kepada penerima atau sasaran pada Program Pamsimas.

Bentuk kegiatan pertama yaitu Pelatihan tingkat masyarakat. Peserta Program Pamsimas adalah KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) yang mana mereka merupakan perwakilan dari seluruh masyarakat Desa Doudo yang telah terpilih untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang terdapat Program Pamsimas dan juga Satlak (Satuan Pelaksana) Program Pamsimas.

Jenis kegiatan pelatihan yang dilakukan dalam Program Pamsimas ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat. Semakin paham masyarakat mengenai maksud dan tujuan dari pelatihan ini maka dengan berbagai jenis pelatihan yang diberikan akan meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Peran masyarakat dalam pelaksanaan program ini sangat penting karena masyarakat menjadi aktor atau pelaku utama dalam program sehingga sukses atau tidaknya pelaksanaan Program Pamsimas.

Tahap Pendayaan

Tahap ini merupakan tahap peningkatan kemampuan yang mana komunitas akan diberikan kekuasaan serta peluang sesuai kemampuan yang telah diperoleh. Dalam tahap ini diperlukan kedisiplinan dan keteraturan dalam proses pemberdayaan dapat menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Peningkatan kemampuan dan keterampilan sangat diperlukan supaya masyarakat dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian dalam hal ini ditandai dengan adanya bentuk ide atau inisiatif masyarakat dalam membuat suatu kegiatan. Bentuk kegiatan pertama yaitu Pelatihan tingkat masyarakat. Pada tahap pendayaan ini masyarakat telah menjalani proses belajar sehingga mereka sudah memiliki kemampuan dan keterampilan yang telah diperoleh dari proses belajar tersebut. Peserta Program PAMSIMAS yaitu anggota KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) dan Satlak (Satuan Pelaksana) Desa Doudo telah mendapatkan beberapa jenis pelatihan antara lain adalah pelatihan administrasi dan keuangan, pelatihan teknik, dan pelatihan kesehatan. Berikut merupakan dokumentasi pelaksanaan pelatihan tingkat masyarakat Desa Doudo Kecamatan Panceng yang dilakukan di Balai Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik:



Pelatihan Administrasi di Balai Desa Doudo



Pelatihan Teknik di Balai Desa Doudo



Pelatihan Kesehatan di Balai Desa Doudo

Gambar 1

Pelatihan Tingkat Masyarakat Desa Doudo Kecamatan Panceng Gresik

Sumber: Dokumen Desa Doudo, 2021

Program Pamsimas sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat menjadi aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan. Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Program Pamsimas di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan Program Pamsimas tahun 2013. Jenis kegiatan tersebut antara lain adalah Pelatihan Tingkat Masyarakat, Pembangunan Sarana Air Minum di Masyarakat dan Sanitasi di Sekolah, dan Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi Program ini memiliki tahapan-tahapan agar tujuan program yang telah ditentukan terlaksana dengan baik.

Tahapan pemberdayaan memiliki makna sendiri yaitu sebagai runtutan perubahan dalam upaya peningkatan keberdayaan masyarakat. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) mengatakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam pemberdayaan yaitu meliputi; Tahap pertama yaitu tahap penyadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan perbaikan kondisi dan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini pihak

pemberdaya/aktor/pelaku pemberdaya berusaha memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat mengenai kondisi mereka saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Pada tahap penyadaran ini dapat diwujudkan melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi. Dalam hal ini, sosialisasi memiliki tujuan untuk mengkomunikasikan mengenai berbagai kegiatan yang ada didalam program dan membantu meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012) menyatakan bahwa proses sosialisasi memiliki peran yang sangat penting karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat mengenai partisipasi dalam program pemberdayaan yang telah dijelaskan.

Kemudian pada tahap kedua yaitu tahap pengkapasitasan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan dalam mengelola sumber daya sehingga dengan keterampilan dasar tersebut dapat mengambil peran dalam proses pembangunan. Pada tahap pengkapasitasan ini, masyarakat akan menjalani sebuah proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki keterkaitan dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Dalam keadaan seperti ini akan mempengaruhi keterbukaan wawasan masyarakat dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini pihak pemberdaya akan memberikan kemampuan kepada peserta program agar memiliki keahlian dan keterampilan yang akan mendukung mereka dalam mengelola sesuatu. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) bahwa proses pemberian kemampuan tersebut akan dapat menyentuh lapisan individu, organisasi, dan sistem nilai berupa workshop, seminar, pelatihan, dan semacamnya.

Tahap pendayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Doudo telah diimplementasikan dengan baik. Pada tahap ini, peserta Program Pamsimas dapat dikatakan mandiri karena mampu membantu Desa Doudo mencapai tujuan dari adanya Program Pamsimas ini. Desa Doudo telah mencapai universal access, meningkatkan jumlah akses air minum masyarakat, dan penerapan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat yang dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat karena proses penyuluhan dilakukan secara aktif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada Program Pamsimas melalui tahap pemberdayaan yang dilakukan secara berurutan dimulai dari tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan dinilai sudah optimal. Namun pemberdayaan masyarakat pada program ini bersifat berkelanjutan dengan kata lain harus terus dilaksanakan sehingga masyarakat penerima program mendapatkan manfaat jangka panjang yang didukung dengan pihak penanggung jawab program yaitu BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) Desa Doudo yang aktif dalam melakukan pengelolaan sarana agar pelayanan dibidang penyediaan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat pasca Program Pamsimas tidak terganggu atau bermasalah. Pemberian pelayanan yang baik mendapatkan respon yang positif dari masyarakat sehingga masyarakat termotivasi untuk mengembangkan Desa Doudo. Dukungan lain untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada Program Pamsimas adalah finansial dengan kepatuhan masyarakat membayar akses air yang dipakai setiap bulan sesuai dengan pemakaian sehingga dapat membantu kebutuhan biaya operasional BP-SPAMS dan cadangan biaya kerusakan sehingga sarana yang sudah terbangun tetap terpelihara dengan baik dan berfungsi secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Program Pamsimas yang dilaksanakan di Desa Doudo Kecamatan Panceng Gresik yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan dan meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat bagi masyarakat pedesaan. Dalam Program Pamsimas terdapat tiga jenis kegiatan yaitu pelatihan tingkat masyarakat, pembangunan sarana air minum di masyarakat dan sanitasi di sekolah, dan promosi perubahan perilaku hygiene dan sanitasi yang dianalisis menggunakan tahap-tahap pemberdayaan masyarakat. tahap-tahap pemberdayaan masyarakat: (a) Tahap Penyadaran, pada tahap ini pihak Pemerintah Desa Doudo memberikan sentuhan penyadaran atau pengetahuan terkait Program Pamsimas melalui sosialisasi dibantu pihak sanitarian puskesmas kecamatan, dan didampingi dengan narasumber yang berasal dari instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Pada tahap ini, sosialisasi yang dilakukan sudah optimal karena didukung dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi untuk mengikuti sosialisasi; (b) Tahap Pengkapasitasan, pada tahap ini pihak Pemerintah Desa

Doudo dibantu dengan instansi terkait memberikan kemampuan dan keterampilan melalui proses belajar dengan melibatkan peserta program kedalam beberapa kegiatan meliputi kegiatan pelatihan seperti pelatihan administrasi dan keuangan, pelatihan teknik, dan pelatihan kesehatan, kegiatan pra konstruksi, dan kegiatan penyuluhan kesehatan. Pada tahap ini, seluruh elemen dalam program melaksanakan kegiatan dengan baik karena penjelasan materi dari setiap kegiatan yang diikuti oleh peserta program disampaikan secara rinci dan jelas. Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan untuk mempersiapkan peserta program sebelum memulai kegiatan fisik; (c) Tahap Pendayaan, pada tahap ini sudah terdapat kemandirian peserta program dengan adanya kemampuan peserta untuk membantu Desa Doudo mewujudkan tujuan Program Pamsimas. Desa Doudo telah mencapai *universal access*, meningkatkan jumlah akses air minum masyarakat, dan menerapkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat. Peserta program melaksanakan semua kegiatan dalam Program Pamsimas sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pamsimas dengan disiplin dan teratur sehingga terwujud inovasi dalam mengelola lingkungan dengan membentuk kampung tematik yang membawa Desa Doudo memperoleh berbagai penghargaan dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional.

Daftar Pustaka

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2018. Riset Kesehatan Dasar 2018. Jakarta
- Desabisa.com: "Dulu Gersang, Kini Rindang: Kisah Desa di Gresik yang Bangkit dari Kekeringan" (diakses pada tanggal 26 Januari 2020)
<https://www.desabisa.com/dulu-gersang-kini-rindang-kisah-desadi-gresik-yang-bangkit-dari-kekeringan/>
- Eko, Sutoro. (2005). *Pemberdayaan Kaum Marginal*. Yogyakarta: APMD Press.
- Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora.
- Ife Jim & Frank Tesoriero. (2008). *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Miles, M.B & Huberman, A.M 1994. *Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publishers.
- Paul, Samuel. (1987). *Community Participation in Development Project-The World Bank Experience*. Washington DC: The World Bank
- Prijono, Onny S., Pranarka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta
- Sedarmayanti. (2000). *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Masdar Maju.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Wrihatnolo, Randy & Riant, Nugroho Dwidjowijoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto. (2015). *Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Saleebey, Dennis. (1992). *The Strength Perspective in Social Work Practice*. London: longman.
- Survei Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik, 2019.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta